

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan komponen utama dalam berbagai sistem kehidupan manusia, baik dalam sistem pemerintahan, perniagaan, pendidikan, maupun sistem kemasyarakatan. Transportasi adalah suatu permintaan turunan (Derived Demand) sehingga bukan menjadi tujuan akhir dan tidak muncul dengan sendirinya, butuh faktor pendorong beserta permintaan lainnya yang menjadi tujuan akhir dari pemanfaatan transportasi tersebut. Transportasi menjadi sarana penghubung bagi manusia dan atau barang dari daerah asal dengan daerah tujuan (Siti Fatimah, 2019).

Anom (2022) mengungkapkan bahwa sistem transportasi merupakan suatu sistem yang berfungsi memindahkan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain sebagai upaya mengatasi hambatan jarak geografis maupun topografis. Sistem transportasi merupakan bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam perpindahan orang maupun barang. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwasannya pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan angkutan umum sebagai jasa angkutan orang dan atau barang baik dalam kota atau kabupaten, antar kota, antar provinsi dan angkutan lintas batas negara.

Dalam kegiatan memindahkan orang atau barang tersebut bukan masalah bagi masyarakat yang berada di kota karena terdapat berbagai macam pilihan angkutan. Namun, bagi masyarakat dari daerah yang wilayahnya terpencil, terisolasi, tertinggal atau berada di wilayah perbatasan, transportasi menjadi masalah karena infrastruktur sarana dan prasarananya kurang memadai dan tingginya biaya transportasi yang dirasakan. Permasalahan tersebut sedang terjadi di daerah di wilayah Kabupaten Malang yaitu, Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading.

Berdasarkan data hasil uji petik Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur, yaitu sebesar 252.800 jiwa, serta masih minimnya akses jalan maupun akses angkutan umum yang menyebabkan daerah tersebut kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya.

Permasalahan angkutan umum yang terjadi di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Ampelgading dan Tirtoyudo adalah tidak terorganisirnya penyediaan sarana angkutan umum, sehingga wilayah terluar Kabupaten Malang menuju pusat kegiatan daerah tersebut kurang terhubung. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil penilitan analisis kemiskinan di sektor pertanian Kabupaten Malang. Dijelaskan bahwa Kabupaten Malang dibagi menjadi tiga klaster dan Kecamatan Tirtoyudo serta Ampelgading termasuk dalam klaster tiga yang merupakan klaster kecamatan miskin dengan rasio 6,93%, Kelompok kecamatan miskin mempunyai tingkat pendapatan yang rendah diakibatkan oleh produktivitas yang buruk, karena kemampuan akses pasar yang rendah, sistem irigasi yang buruk, biaya produksi yang tinggi, tingkat upah yang rendah dan juga tingkat produksi yang rendah pula. Angkutan Umum menjadi urat nadi perekonomian karena mampu menjadi alat pemersatu bangsa dan menjadi salah satu komponen yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menumbuhkan sektor perekonomian baru maupun meningkatkan dan mengembangkan sektor perekonomian yang sudah ada. Karena wilayah ini tidak terlayani angkutan umum, menyebabkan masyarakat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan sewa dengan biaya yang mahal. Ditambah medan jalan yang sulit menyebabkan lifetime kendaraan menjadi singkat. Selain permasalahan itu, wilayah Ampelgading juga merupakan daerah terpencil, sehingga tingkat daya beli masyarakat rendah. Dengan adanya perencanaan trayek angkutan jalan perintis akan mempermudah masyarakat wilayah Ampelgading untuk berpergian ke pusat kegiatan dan juga sebaliknya untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang

terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Oleh karena kondisi inilah, Untuk menindaklanjuti surat usulan nomor 500.111.8./2023 perihal Layanan Angkutan Penumpang Umum Perintis dengan jalur Trayek Terminal Tipe C Dampit - Pasar Kaligadung - Pasar Tirtoyudo - Kantor Kecamatan Ampelgading yang diajukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang kepada Kepala BPTD Kelas II Direktorat Jendral Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur guna pemenuhan kebutuhan angkutan umum yang berbasis subsidi untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERENCANAAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM PERINTIS TRAYEK DAMPIT - TIRTOYUDO - AMPELGADING DI KABUPATEN MALANG”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis permasalahan dari transportasi yang ada di Kabupaten Malang, terdapat beberapa identifikasi masalah yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya di bidang angkutan umum, antara lain:

1. Tidak adanya aksesibilitas pelayanan angkutan umum di wilayah Tirtoyudo untuk mengakomodasi pergerakan orang menuju pusat kegiatan lokal di Kecamatan Dampit.
2. Tidak adanya aksesibilitas pelayanan angkutan umum di wilayah Ampelgading untuk mengakomodasi pergerakan orang menuju pusat kegiatan lokal di Kecamatan Dampit.
3. Masyarakat harus menggunakan angkutan pribadi atau angkutan sewa dengan biaya yang mahal.
4. Sulitnya distribusi pertanian, perkebunan, peternakan, dan komoditi kerakyatan lainnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, meliputi:

1. Berapa *demand potensial* untuk layanan angkutan umum perintis trayek Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading?

2. Bagaimana rencana sistem operasional untuk layanan angkutan umum perintis trayek Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading?
3. Berapa tarif dan subsidi rencana untuk layanan angkutan umum perintis trayek Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud dari penelitian ini yaitu untuk melakukan perencanaan layanan angkutan umum perintis dari Kecamatan Ampelgading menuju pusat kegiatan lokal di Kecamatan Dampit yang berguna untuk mengatasi kesulitan masyarakat akan kebutuhan angkutan umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui *demand potensial* untuk untuk layanan angkutan penumpang umum perintis trayek Dampit - Tirtoyudo – Ampelgading.
2. Merencanakan sistem operasional angkutan perintis trayek Dampit - Tirtoyudo – Ampelgading.
3. Mengetahui tarif dan subsidi rencana layanan angkutan umum perintis trayek Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading.

1.5. Ruang Lingkup

Pada penelitian yang dilakukan kali ini dibutuhkan kejelasan terkait masalah yang akan dikaji dan harus memiliki batasan yang mana nantinya tidak menyimpang dari target yang ditentukan. Berikut merupakan ruang lingkup penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Penelitian ini dilakukan mencakup wilayah yang terisolir yaitu Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.
2. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan dan Subsidi berdasar PM No. 73 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Jalan Perintis dan (Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2752/AJ.206/DRJD/2021 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Umum Perkotaan, 2021).

3. Perhitungan tarif didasarkan pada analisis *ability to pay* (ATP) dan *willingness to pay* (WTP) berdasarkan hasil survei wawancara *stated of preference*.